



TOPONIMI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA DI ACEH

Oleh:
*Nasrul Hamdani, Sudirman
dan Miftah Roma Uli Tua*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH





TOPONIMI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA DI ACEH

**Nasrul Hamdani
Sudirman
Miftah Roma Uli Tua**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Banda Aceh
2017**

Nasrul Hamdani, Sudirman & Miftah Roma Uli Tua:
Toponimi Ibukota Kabupaten & Kota di Aceh

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

Pengarah : Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh,
Irina Dewi Wanti, S.S. MSP.
Penata letak : Nasrul Hamdani
Desain sampul : Angga
Penyunting : Drs. Nurdin AR

Penerbit
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Kampung Mulia
Telp./Faks. 0651-23226, Banda Aceh 23123
www.bpsnt-bandaaceh.com

Cetakan Pertama, 2017
ISBN No. 978-602-9457-69-8
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

Alhamdulillah, patut kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa, atas berkenaan-Nya, laporan penelitian ini sudah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat bergembira atas selesainya laporan penelitian ini. Naskah laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti BPNB Aceh pada program kerja tahun 2016.

Kita perlu tahu sejarah dan asal-usul nama kota tempat kelahiran. Dengan begitu kita akan lebih mengenali, menghargai, mencintai, dan patut merasa bangga dengan kota kelahiran. Tentu tidak semua orang tahu dan hafal sejarah kota-kota, terutama kota kelahirannya. Jangan-jangan banyak juga pemimpin yang tidak tahu riwayat kota yang dipimpinnya dan tidak sedikit pula pemimpin yang belum tahu sejarah dan asal muasal nama ibu kota daerah yang dipimpinnya.

Hasil penelitian ini menyajikan sejarah dan asal-usul kota di Aceh sehingga kita dapat memperoleh informasi tentangnya secara lebih fokus dan beragam. Tidak hanya riwayat dan asal-usulnya, tetapi juga dilengkapi gambaran keadaan kota yang dapat memancing kenangan pembaca. Beginilah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti BPNB Aceh dalam menyuguhkan bacaan sejarah, tanpa harus mengerutkan dahi, tetapi justru dengan rileks, santai, dan menyenangkan.

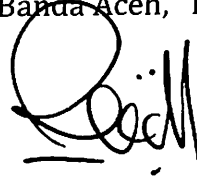
Saya yakin, apabila setiap kita dapat pula menyusun dan menerbitkan hasil penelitian semacam ini maka semakin banyak unsur-unsur sejarah dan budaya Indonesia yang kini belum diketahui, akan dapat diungkapkan dan dikembangkan ke depan. Dengan demikian, kita lebih kaya akan bahan-bahan yang

diperlukan untuk mempelajari dan mengenal identitas bangsa kita sendiri dan historis kulturilnya, suatu hal yang mutlak diperlukan bagi pembangunan bangsa

Atas nama Pimpinan BPNB Aceh, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para penulis yang telah menyelesaikan laporan ini dan dengan senang hati menyerahkan naskahnya kepada BPNB Aceh untuk didokumentasikan dan selanjutnya akan diproses untuk dipublikasikan agar bermanfaat bagi khalayak. Selesaiannya laporan ini, selain menambah informasi tentang sejarah dan budaya daerah, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh.

Banyak pihak yang telah membantu sehingga jilid pertama ini dapat diselesaikan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, ibarat ungkapan pepatah 'tiada gading yang tak retak,' kesempurnaan hanya milik Allah. Namun, hasil penelitian ini patut diapresiasi karena penulisnya telah membangkitkan pucuk yang terendam, suatu pekerjaan yang jarang dipedulikan orang. Semoga laporan ini bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 2017



Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP
NIP. 197105231996012001

SEKAPUR SIRIH, SEULAS PINANG

Puji syukur kami persembahkan kepada Allah Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya naskah laporan ini dapat diselesaikan. Naskah ini semula merupakan laporan Pemetaan dan Dokumentasi Toponimi Ibu Kota Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam naskah awal berisi hasil pemetaan, letak, struktur kota dan cerita tentang asal-usul kota yang dikaji berdasar pada latar sosiologis, sosio-historis, dan sosio-politik kota yang menjadi ibu kota kabupaten/kota di Aceh.

Masyarakat Aceh memiliki budaya penyebutan nama daerah sesuai dengan kondisi lingkungan fisik daerah, kejadian atau peristiwa-peristiwa besar, legenda, dan ketokohan seseorang. Kondisi geografis dan peristiwa daerah tersebut kemudian ditabalkan bagi nama daerah yang baru saja didiami dan tidak jarang masih dipakai hingga sekarang. Oleh karena itu, nama-nama daerah di Aceh terkadang terdengar unik, baik bagi pendatang maupun warga setempat.

Tentu saja di luar sumber yang sudah diperoleh dalam laporan ini, masih banyak sumber lain yang bisa jadi lebih akurat atau sebaliknya, sehingga terjadi variasi mengenai sumber dan variasi dalam penjelasan asal-usul nama kota. Walaupun penulis telah berusaha secara sungguh-sungguh memetakan, menghimpun, dan menggambarkan morfologi kota, dan keadaan sosial dalam pemetaan dan dokumentasi toponimi ibu kota/kota dari berbagai sumber. Untuk itu, sangat dimungkinkan dilakukan pendalaman lebih lanjut dari sekedar sumber yang sudah diperoleh.

Untuk menggambarkan perubahan dan kesinambungan perkotaan di Aceh, terutama sejak otonomi daerah yang mendorong pemekaran, kami membagi penerbitan dalam dua jilid.

Jilid pertama berisi tentang kisah tentang asal-usul dan sejarah 10 ditambah satu 'kota-kota lama' yang menjadi 'ibukota bersama' antara kabupaten dan kotamadya di Aceh sebelum dimekarkan. Satu kota tambahan itu ialah kota Sinabang yang kini menjadi ibukota Kabupaten Simuelue.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi arti dan peran dari berbagai pihak, kesempatan pertama ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak penyandang dana, dalam hal ini BPNB Aceh. Begitu juga kepada semua informan yang telah memberikan berbagai informasi berkaitan dengan objek penelitian ini, disampaikan ucapan terima kasih.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di BPNB Aceh yang telah memberikan berbagai bantuan, baik berupa literatur, informasi kehangatan selama berdiskusi dalam penelitian ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Akhirul kalam, hanya kepada Allah penulis mohon petunjuk dan hidayah-Nya. Kami berharap penulisan ini bermanfaat sebagai usaha menggali sumber sejarah lokal di daerah, baik sebagai masukan bagi kebijakan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.

Banda Aceh, Desember 2017

Nasrul Hamdani, Sudirman,
dan Miftah Roma Uli Tua

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
i

Sekapur Sirih Seulas Pinang
iii

Daftar Isi
v

PENGANTAR: TOPONIMI, BUKAN SEKADAR USUL DAN NAMA KOTA
1

Aceh: 'Nanggroe Aceh Darussalam'
5

Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat
17

Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan
22

Takengon
Kabupaten Aceh Tengah
28

Kutacane
Kabupaten Aceh Tenggara
34

Bireuen
Kabupaten Bireuen
39

Sinabang
Kabupaten Simeulue
43

Tepcnimi Ibuketa Kabupaten/Kota di Aceh

Langsa
Kota Langsa
47

Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe
52

Sabang
Kota Sabang
57

PENGANTAR

TOPONIMI, BUKAN SEKADAR USUL DAN NAMA KOTA

Penamaan sebuah tempat umumnya disandarkan pada unsur geografi di sekitarnya. Unsur geografi atau disebut juga unsur topografi seperti laut, pulau, pantai, sungai, teluk, muara, rawa, lembah, bukit dan gunung selalu menjadi dasar penamaan satu tempat yang tumbuh dan berkembang sebagai pemukiman di lingkungan geografi itu. Penggunaan kata *lhok* pada Lhok Lambaro di sekitar Banda Aceh masa kini, Lhokseumawe, Lhoksukon atau Lhok Nibong merujuk pada keberadaan tempat itu yang terletak di sekitar teluk. Penggunaan kata *cot* yang merujuk pada bukit, tempat yang agak tinggi tetapi bukan gunung, seperti pada Cot Lampue, Gampong Cot, Cot Girek atau Cot Gueh menunjukkan hal yang serupa.

Namun pemberian nama satu tempat itu tidak saja disandarkan pada 'gambaran alam' semata. Sejarah serta konteks non-geografi lain memiliki peran dalam penamaan satu tempat hingga nama untuk tempat yang 'disepakati' itu mempunyai makna tersendiri, dikukuhkan oleh rangkaian cerita dari masa lalu yang cenderung punya ragam versi hingga dapat diterima. Tapaktuan ibukota Aceh Selatan misalnya, menurut legenda, nama kota ini berasal dari seorang sakti bernama Tuan Tapa yang marah karena terganggu oleh sepasang naga. Jejak kaki Tuan Tapa yang membekas di atas karang saat menerjang naga dari perbukitan menjadi sandaran penamaan Tapaktuan.

Cerita sejarah Aceh yang romantik juga melatari penamaan kota Subulussalam yang digagas sejak awal tahun 1960-an. Nama Subulussalam, kota baru sama sekali yang sebelum dikukuhkan pernah dinamai Simpang Empat dan Bandar Baru ini dikaitkan dengan proses rekonsiliasi Aceh sesudah berakhirnya DI/TII. Nama Subulussalam yang dianjurkan Gubernur Daerah istimewa Aceh, Prof. Dr. Ali Hasjmy masa itu berarti 'jalan menuju kedamaian' atau 'jalan damai' juga dikaitkan dengan pengukuhan nama Banda(r) Aceh menggantikan Kutaraja dan Darussalam untuk kawasan yang di atasnya kelak berdiri Universitas Syiah Kuala dan IAIN ar-Raniry dan lebih dikenal sebagai Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma).

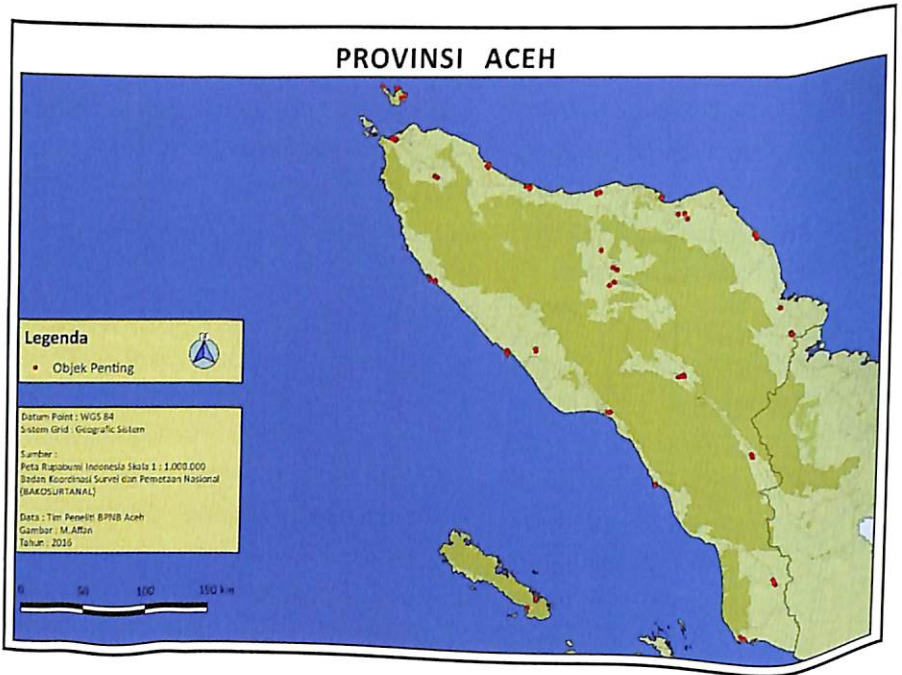
Penulisan nama tempat dan segala hal yang berkaitan dokumentasi toponimi ini berkembang bersamaan dengan penggambaran peta, penataan atau standarisasi nama daerah administrasi dan belakangan dihubungkan dengan aktivitas melokalisir daerah administratif menjadi kawasan budaya masa otonomi daerah. Para pembuat peta dan administrator selain memandang unsur georafis juga merujuk pada 'apa dan bagaimana warga setempat menyebut nama lokasi yang mereka diami' ketika menerjemahkan nama yang disebut secara verbal ke dalam tulisan atau simbol dalam peta. Kesalahan penulisan atau simbolisasi mungkin terjadi tetapi rangkaian cerita yang diyakini penduduk tentang makna dan 'gambaran' sosial di balik nama tempat yang dipetakan itu menjadi petunjuk akurat untuk memastikan bahwa tempat yang tercantum dalam peta memang lokasi yang dikunjungi dan digambarkan pembuat peta.

Dalam konteks pemetaan ini, ibukota kabupaten/kota tidak dipandang sebagai kota administratif

semata melainkan sebuah ruang sosial yang menautkan sejumlah unit-unit sosial, menjadi 'saksi' ataupun latar bagi sejumlah peristiwa sosial. Oleh sebab itu, pemetaan dan dokumentasi toponimi ibukota dalam arti menghimpun, menggambarkan morfologi kota dan keadaan sosial serta menghimpun makluman dan menyingkap apa yang 'tersimpan' di balik cerita tentang nama ibukota kabupaten/kota di Aceh mempunyai bobot 'khusus' mengingat Aceh dan kota-kota di Aceh di provinsi ini telah menjadi monumen dan berperan dalam serentet peristiwa masa pra-kolonial sampai perang kemerdekaan bahkan jauh sesudah periode itu.

Secara teknis belum ditemukan (himpunan utuh) data geografi sejarah dan toponimi ibukota kabupaten/kota se-Aceh tetapi jika merujuk pada kota dalam pengertian daerah administratif maka 23 kota atau lebih yang menjadi ibukota kabupaten/kota se-Aceh, data geografi dan cerita sejarah tentang kota-kota itu tidak dapat dipisahkan perkembangan sosial di perkotaan Aceh dan pengkotaan yang cenderung membangun suatu keadaan *vis-à-vis* dengan negara dan/atau dengan hegemoni Aceh yang menjadi budaya dominan di provinsi yang menyandang status sebagai daerah otonomi khusus. Oleh sebab itu, toponimi merupakan pilihan menarik karena kota-kota di Aceh jika didasarkan pada keadaan geopolitik, kebudayaan dan tradisi masyarakatnya menyimpan cerita unik sehingga kota selalu dapat dijadikan 'jembatan penghubung' antara masa lalu yang gemilang dengan masa kini dan masa depan.

PETA ACEH



ACEH

“NANGGROE ACEH DARUSSALAM”

Istilah ‘Aceh’ yang digunakan sekarang ini mulai disebut pada paruh pertama abad ke-16. Tomé Pires juru tulis sekaligus bendahara Alfonso d’Albuquerque yang terkenal dalam penjelajahan samudera inilah yang menuliskan ‘Aceh’ sebagai toponimi. *Achin*, *Achei* dan *Achey* demikian istilah yang dituliskan Pires untuk menyebutkan Aceh masa itu. Pires juga menggolongkan Aceh sebagai *reino* atau kerajaan utama yang terletak di bawah peta kepulauan *Gamispola*.

Penggolongan Aceh sebagai *reino* oleh Pires merupakan penanda kekuatan Aceh yang telah menjadi ‘tuan bagi negeri-negeri di sekitarnya’. Pernyataan ini tertulis dalam *Suma Oriental of Tomé Pires*, buku yang ditulis dan diterjemahkan Armando Z. Cortesão lebih dari empat abad setelah Pires menyerahkan laporan itu kepada kep ada Raja Manuel dari Portugis yang mengutus armada itu.ⁱ

Cortesão yang menyunting laporan Pires dan rekan sekapalnya Francisco Rodrigues, orang yang disebutkan menemukan Pulau Rempah-rempah itu juga menuliskan Aceh sebagai *Achin*, *Achei*, *Achey* atau *Achem* secara bersamaan sebagaimana Pires menuliskannya. Namun dapat dipastikan *Achey* merupakan istilah otentik yang paling mendekati dengan istilah masa kini dan lebih banyak digunakan Pires dalam laporannya itu. *Reino de Achey e Lambry* yang berarti kira kira-kira kerajaan (utama) Aceh

dan Lamuri, demikian tulisan Pires mengenai Aceh sebagaimana disunting oleh Cortesão.

Perihal bagaimana nama 'Aceh' abad ke-16 itu dituliskan para penjelajah samudera dari Barat bahwa Aceh masa itu bukan sekedar toponimi melainkan *patron* bagi sejumlah *reinos* dan *terras* di pulau yang disebutnya Çamotora (mungkin inilah Sumatera itu). Daerah kekuasaan *Achey* terbentang dari kepulauan *Gamispola* yang berbatasan dengan kepulauan Nicobar hingga ke suatu daerah yang disebut Pires maupun Cortesão dengan *Pirim* yang diasosiasikan dengan Pedir meskipun diberi tanda '?' karena mungkin sekali ini merupakan nama atau istilah yang berasal dari Turki.

Begitulah nama Aceh ditulis Pires pada tahun 1512. Nama yang menjadi entitas politik sekaligus negeri dengan kuasa adidaya yang menggentarkan negeri-negeri Melayu di Sumatera (Timur) dan Semenanjung Melayuⁱⁱ hingga akhir abad ke-19 sebelum ditaklukkan Belanda pada 1873/1874. Nama Aceh selalu dilafalkan dan ditulis berbeda meskipun semua lafal itu merujuk pada satu teritori di ujung Barat Laut Sumatera yang menjadi pusat kekuasaan Aceh, yang juga bisa berarti suatu tempat yang disebut Lhok Lambaro bukan Banda Aceh sebagai toponimi dan daerah administratif di masa kini.ⁱⁱⁱ

Pada tahun 1840, John Anderson, setiausaha Gubernur Prince of Wales II di Pulau Pinang menerbitkan laporan bertajuk *Acheen and the Ports on the North and East Coast of Sumatra*. Istilah *Achey* dalam laporan Portugis ditulis *Acheen* oleh bekas pedagang bebas Inggris ini. Tidak ada perbedaan atas dua nama atau istilah untuk kerajaan

Islam yang dirintis (Sultan) Meurah Johan pendiri dinasti Darul Kamal yang konon merupakan Pangeran Linge dari Gayo di pedalaman Aceh yang membangun kekuasaan di pesisir pantai Aceh Besar masa kini sebelum dilebur dinasti Meukuta Alam yang 'memenangi' persaingan sebagai (Aceh) Darussalam.

Belanda, kolonialis yang dianggap kebanyakan masyarakat Aceh tidak pernah menaklukkan salah satu negeri terkemuka karena reputasi perdagangannya yang terletak 'di bawah angin ini', menggunakan istilah *Atsjin* sebagai nama kawasan ini.^{iv} Istilah *Atsjin* ini tercantum dalam (peta) *Kaart van het Rijk van Atsjin* yang dirilis G. Kolff & Co. pada tahun 1873. Namun pada *Kaart van onze tegenwoordige Positie op Atjeh* (1875) lalu pada *Automobielkaart van Noord Sumatra* (1937), istilah yang dilafalkan sama dengan istilah sekarang secara resmi mulai digunakan.

Penggunaan nama *Atjeh* pada masa kolonial merupakan keniscayaan sejarah. Penulisan Aceh dengan ejaan 'tj' yang kemudian ejaan itu digantikan oleh huruf 'c' sekarang ini didasarkan pada penggunaan Tata Bahasa Melayu yang berlaku masa itu. Tata bahasa yang disusun Charles Adriaan van Ophuijsen (kemudian dikenal sebagai ejaan van Ophuijsen) ini secara resmi diakui pemerintah Hindia Belanda sejak 1901 dan menjadi pedoman penulisan kata-kata dalam bahasa Melayu atau serapan Belanda masa itu, termasuk penulisan istilah bahasa Melayu lain yang mengandung ejaan/huruf 'c'.

Setelah Indonesia merdeka, *Aceh* resmi menjadi bagian atau nama sebuah daerah administratif di Indonesia

yang nama termasuk batas wilayah administratifnya berubah-ubah sejak 1945. Hubungan antara Aceh dengan Jakarta sejak periode ini dilanda pasang dan surut. Sebagai wilayah Indonesia yang tidak pernah lagi diduduki Belanda sejak 1945, Aceh didaulat sebagai 'Daerah Modal'. Pesawat Dakota dengan nomor registrasi RI 001 merupakan bukti monumental mengenai sumbangan rakyat Aceh kepada Indonesia selama masa revolusi.

Penguatan Aceh sebagai daerah istimewa dalam sejarah ketatanegaraan merupakan apresiasi Jakarta kepada Aceh. Namun penetapan nama Daerah Istimewa Aceh lalu diganti dengan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hingga digunakan nama Aceh 'saja' sebagai nama resmi salah satu provinsi di Indonesia yang enggan menggunakan istilah provinsi itu dan menguasai daerah seluas 58.376 Km² memiliki cerita tersendiri dalam perubahan dan kesinambungan politik penamaan daerah dan sejarah ketatanegaraan di Indonesia.

Terlepas dari cerita di balik rasa istimewa dan bentuk Aceh yang istimewa itu, sejak didaulat sebagai Daerah Istimewa Aceh (1959) hingga diberi hak untuk memakai istilah Pemerintah Aceh (2006/2009), asal-usul dan penulisan ragam nama 'Aceh' tidak pernah berhenti diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Meskipun sebagian besar orang Aceh tampak bersepakat bahwa 'Aceh' masa kini adalah kesinambungan Kesultanan Aceh di masa lalu tetapi untuk urusan asal-usul nama Aceh dan bagaimana merepresentasikan Aceh itu orang Aceh punya cerita sendiri.

Romantisme masa lalu, kemajemukan sosial serta pengalaman masyarakat Aceh selama konflik membuat daerah ini memancarkan pesona bagi siapapun yang ingin mempelajarinya. Sebagaimana nama 'Aceh', asal-usul orang Aceh yang berperawakan seperti orang Arab, India atau Barat tidak pernah mencapai kata tuntas. Dada Meuraxa, yang mungkin saja diilhami oleh perawakan dan kebahasaan orang Aceh yang berbeda dengan perawakan umum dan rumpun bahasa di Sumatera itu pernah membisikkan kepada Ali Hasjmi bahwa 'Aceh' itu gabungan kata Arab, Cina, Eropa dan Hindustan.^v Tanpa harus memperdebatkannya, hal ini sudah diterima sebagai keniscayaan dan boleh jadi benar atau bisa jadi tidak benar.

Ada pula yang merunut kata *Acheen* atau *Atsjin* yang digunakan sumber Inggris dan Belanda pada abad ke-19 itu lalu berubah menjadi *Aceh* merupakan istilah serapan dari salah satu bahasa yang berkembang di Hindustan (India). Pendapat ini didasarkan pada sebuah kisah tentang seorang raja di tanah Hindustan yang berkelana untuk mencari adiknya yang menghilang. Di daerah Aceh masa kini, sang raja disebutkan berhasil menemukan adiknya yang sudah menghilang sejak lama. Katanya, kata *aachin* itu kabarnya berasal dari salah satu bahasa di Hindustan yang berarti adik.

Ragam kisah tentang asal-usul nama Aceh itu memang berbanding lurus dengan perasaan dan kenyataan fisik masyarakat Aceh sebagai kesatuan kelompok etnik yang mengaku Aceh dan berbahasa Aceh. Namun kecenderungan romantik yang 'diidap' masyarakat Aceh setelah Sultan Muhammad Daudsyah *taslim* (1903) kepada Belanda ditambah berkali-kali 'ditipu' Jakarta membuat

orang Aceh enggan menerima alur kisah maupun logika sejarah lain dalam cerita sejarahnya.

Anak-anak muda Aceh yang tumbuh dan menjadi dewasa lebih awal di masa konflik selalu menyatakan 'Aceh tidak pernah dijajah Belanda' tetapi 'dijajah "Jakarta"!'. Sikap antipati pada Belanda dan Jawa itu berkembang dan tertanam sedemikian rupa dalam pikiran sebagian anak-anak muda Aceh. Sayangnya pikiran yang tertanam itu tidak diikuti dengan aktualisasi ke-Aceh-an mereka. Soal nama Aceh saja, entah mengapa setelah lebih dari 60 tahun Belanda enyah dari Indonesia, kata *Atjeh* yang *jadul* itu masih saja digunakan secara ekspresif oleh anak-anak muda Aceh.

Atjeh, nama warisan dari Belanda yang dianggap *kaphe* ini masih bahkan makin sering saja dan meluas pula penggunaannya, mulai dari nama ornamen souvenir dari Banda Aceh sampai nama toko atau badan usaha. Penggunaan yang menunjukkan ambiguitas atau mungkin saja anomali ini akan berbanding terbalik apabila anak-anak muda Aceh bicara sejarah politiknya. Ketika berbicara, mau tidak mau nama Belanda, kolonialis yang mewariskan istilah *Atjeh* dan makin sering dipakai belakangan setidaknya di Banda Aceh, disebut dalam perbincangan.

Nama atau istilah lain dengan ejaan 'tj' barangkali tidak dipakai lagi di Belanda. Nama yang bernuansa romantik ini memang unik dan menarik jika digunakan sebagai 'kosmetik' tetapi suasananya akan berbanding terbalik jika romantisme pada kata *Atjeh* itu dikaitkan dengan perasaan dan membentuk kesadaran sejarah anak-anak muda Aceh kini terutama dalam memandang Belanda

dan hubungannya dengan sejarah Aceh yang diinternalisasikan ke generasi di bawahnya dengan kalimat -meminjam istilah remaja zaman sekarang- narsis: *Aceh hantom dijajah le Beulanda*.

Setelah *Atjeh* ada lagi Istilah *Acheh* dengan huruf 'h' setelah 'c'. Istilah dianggap lebih punya nilai ke-Aceh-an dibanding kata *Atjeh* yang merupakan warisan kolonial Belanda itu. Seorang sejarawan dari Australia pernah berkisah tentang penolakan Jakarta atas kata *Acheh* selama perundingan damai yang berlangsung antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di dunia, GAM punya nama internasional: ASNLF singkatan dari *Acheh Sumatra National Liberation Front*. Lambang dan *cogan*-nya singa hewan yang tidak pernah ada di Asia apalagi Aceh dan *bouraq*, makhluk hibrid dalam kisah Isra' Mi'raj.

Mengapa Jakarta menolak *Acheh* yang sesungguhnya -kata kebanyakan orang- lebih merepresentasikan Aceh? Kami belum punya konstruksi jawaban yang *pas* mengenai ini tetapi kami meyakini anak-anak muda Aceh pasti memiliki konstruksi historis dan tentu saja (harus) punya konstruk ideologis pada istilah *Acheh* ini. Konstruksi yang dipahami dan diyakini tentu dapat memberikan pandangan lain, mengapa pula Aceh yang terdiri dari empat huruf itu harus ditulis dengan lima huruf *Acheh*, meskipun pelafalannya sama?

Kini, istilah Aceh memang ditulis sebagaimana dilafalkan banyak orang di Indonesia mengikuti pola pelafalan Germanik. Namun suasana keruhanian yang berlandaskan syariat Islam di Aceh tetap harus dibangun

untuk mengukuhkan eksistensi kesejarahan Aceh sebagai 'Daerah Modal' atau Serambi Indonesia di sebelah Barat. Ke-Aceh-an orang Aceh ini juga harus dibangun sebagai dasar mengukuhkan keistimewaan Aceh yang kini semakin istimewa saja oleh banyak hal; anggaran belanja dan pendapatannya lebih banyak, ada partai lokal dan terasa istimewa oleh keberadaan Wali Nanggroe.

Soal Aceh yang diberi otonomi khusus untuk menerapkan ajaran (syariat) Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan direpresentasikan oleh julukan Serambi Mekkah. Julukan yang mencitrakan religiositas orang Aceh ini ternyata berasal dari Sukarno, Presiden RI yang dikagumi orang Aceh tetapi belakangan dicap 'menipu' orang Aceh. Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1978-1983, mengkritik istilah Serambi Mekkah kepada Tgk. M. Daud Beureueh di Paris ketika singgah di sana. Kata Joesoef, wajah Buya langsung berkerut masam tanda tak senang lalu menjawab datar, julukan itu bukan berasal dari dia, atau juga orang Aceh lain tetapi julukan itu datang dari Bung Karno ketika berkunjung ke Aceh pada Juni 1948.^{vi}

Begitulah transformasi nama Aceh. Di mulai dari *Achei, Achey, Achem, Acheen, Atsjin, Atjeh, Acheh* sampai dibakukan sebagai Aceh tidak menunjukkan adanya pergeseran ruang dan waktu. Pergeseran justru terjadi dalam pemaknaan Aceh sebagai sebuah *isim* dengan serangkaian nilai yang dapat membangkitkan perasaan yang khas, bergelora dan mengikat orang Aceh untuk segera menunjukkan suatu sikap dan pendirian sebagai Aceh. Sikap dan pendirian ini kemudian didokumentasikan dengan rasa kagum, hormat, sekaligus gemas, geram bahkan (mungkin)

benci di antaranya oleh Snouck Hurgronje, G.B. Hooijer atau H.C. Zentgraaf.

Penulisan nama Aceh yang mengalami transformasi bentuk itu bukanlah soal politik penulisan nama semata-mata. Transformasi nama Aceh itu menyiratkan eksistensi simbol sekaligus ekspresi perasaan, kesadaran sejarah dan kebanggaan orang Aceh atas identitas ke-Aceh-an orang Aceh yang kini seolah kembali menjadi pemain yang diperhitungkan dalam dinamika politik dan ekonomi kawasan Transformasi nama Aceh itu juga menunjukkan proses dari suatu perkembangan kompleks yang menjadikan Aceh dan orang Aceh seperti sekarang ini atau seperti yang dipikirkan orang bukan-Aceh terhadap Aceh.

Kecenderungan penyempitan pemaknaan Aceh karena adanya celah dalam otonomi tampaknya menjadi kecenderungan dinamika politik belakangan ini. Melambangkan Aceh yang punya masa lalu gemilang dengan simbol-simbol primordial yang sempit agaknya menjadi keniscayaan politik masa kini. Padahal, seperti telah disebut di atas, nama Aceh apabila kata itu diurai akan menjadi representasi dari empat kelompok etnik atau sebut saja ras di dunia yang memiliki peradaban tinggi, sudah cukup untuk menunjukkan keberagaman di Aceh dan keterbukaan orang Aceh enam atau lima abad yang lalu.

Masa lalu Aceh yang gemilang itu sering direkonstruksi secara romantis untuk kepentingan tertentu. Konstruksi historis-romantik ini membuat orang Aceh hanya memandang dirinya ke dalam tanpa menimbang peran entitas lain dalam perubahan dan kesinambungan sosial di Aceh. Selain itu, kesadaran sejarah yang tidak

disandarkan pada konstruksi historis yang objektif akan membuat orang Aceh mengalami disorientasi. Lihat saja penggunaan istilah *Atjeh* yang makin meluas itu. Jika orang Aceh terutama anak-anak mudanya terus atau masih menggunakan istilah *Atjeh* untuk menunjukkan dirinya, bukankah Belanda juga menunjukkan eksistensinya?

ⁱ Armando Z. Cortesão (Ed.), *The Suma Oriental of Tomé Pires: an Account of the East, from the Red Sea To China. Written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues Pilot-Major of the Armada that Discovered Banda and the Moluccas*, New Delhi: Asian Educational Services, 2005, hlm. 135-136.

ⁱⁱ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

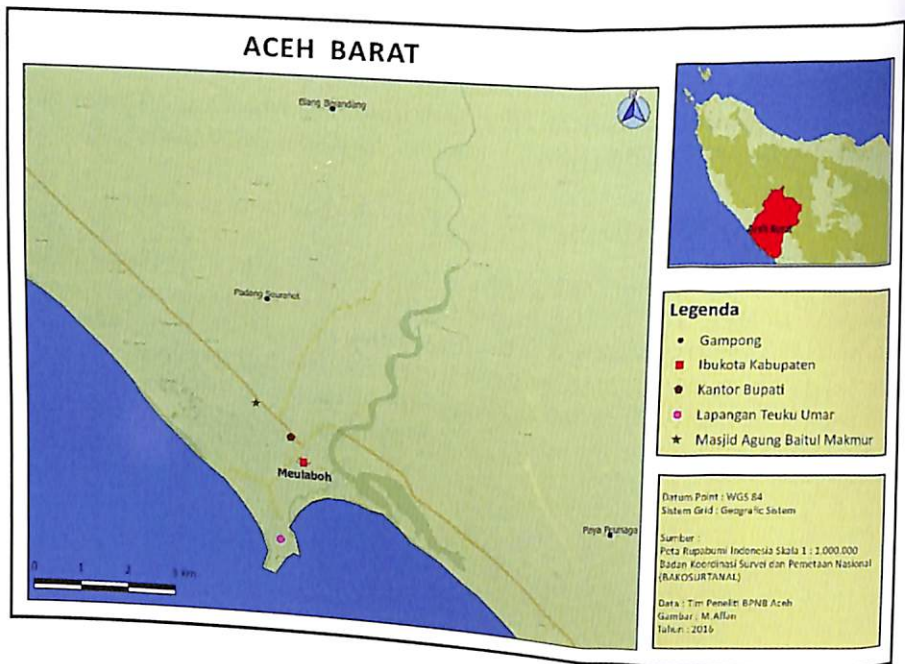
ⁱⁱⁱ Silahkan rujuk E. Edwards McKinnon, *Beyond Serandib: A Note on Lambri at the Northern Tip of Aceh* pp. 102-121 (naskah lepas hasil unduhan, jurnal terbit tidak diketahui).

^{iv} Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga: Tanah di Bawah Angin 1450-1680* (Jilid 1), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

^v Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera*, Medan: Hasmar, 1974.

^{vi} Daoed Joesoef 'Kesalahan Kecil Berpeluang Jadi Besar dalam *Kompas* 1 Mei 2013. Dalam artikel ini Joesoef ingin mengoreksi simbolisasi keistimewaan Aceh yang tidak mencerminkan penerapan syariat Islam yang ideal. Menurut Joesoef aktualisasi syariat Islam itu seharusnya disandarkan pada pengalaman empirik-historis dari masa keemasan Islam yaitu mendorong pengembangan kekuatan nalar dan budaya keilmuan.

PETA KABUPATEN ACEH BARAT



MEULABOH

KABUPATEN ACEH BARAT

Meulaboh merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Kota ini terletak sekitar 175 km tenggara Kota Banda Aceh. Meulaboh pada mulanya dikenal dengan negeri Pasir Karam yang dibangun pada masa Sultan Sayidil Mukammil (1588--1604). Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607--1636) negeri tersebut ditingkatkan pembangunannya. Di negeri Pasir Karam dibuka perkebunan lada, tetapi tidak begitu berkembang karena kalah bersaing dengan negeri Singkil yang lebih maju karena banyak kapal dagang yang singgah untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus.ⁱ

Pada masa Sultan Djamalul Alam, pembangunan negeri Pasir Karam semakin ditingkatkan. Untuk membuka lahan perkebunan, seperti perkebunan lada didatangkan pekerja dari Pidie dan Aceh Besar. Setelah itu, disusul pula oleh orang Minangkabau. Ketika sesampai di teluk Pasir Karam, orang Minangkabau tersebut sepakat untuk berlabuh, mereka mengatakan *di sikolah kito berlaboh* (di sinilah kita berlabuh).ⁱⁱ

Sejak itulah negeri Pasir Karam dikenal dengan nama Meulaboh yang berasal dari kata *berlaboh*. Pendatang Minangkabau tersebut hidup berbaur dengan masyarakat setempat dan kemudian ada yang menjadi pemimpin. Di antaranya adalah Datuk Machdum Sakti dari Rawa dan Datuk Agam dari Luhak Agam. Mereka membuka hutan

untuk dijadikan permukiman dan membaginya menjadi dua wilayah, Datuk Machdum Sakti membuka permukiman di Merbau dan Datuk Raja Agam membuka lahan permukiman di Ranto Panyang.ⁱⁱⁱ

Orang asing menyebutkan Meulaboh dengan istilah yang beragam, Anthony Reid menyebutkan salah satu pelabuhan di kawasan teluk barat Aceh dengan nama *Nalaboo*. Augustin de Beaulieu (1621) menyebutkan Meulaboh dengan *Labo*.^{iv} Lee Kam Hing menyebutkan dengan nama *Analabu* dengan mengutip sketsa lukisan peta yang dibuat oleh Kapten Samuel Ashmore pada tahun 1821.^v K. F. H van Langen pada abad ke-19 menyebutkannya dengan *Melaboeh*^{vi} dan J. Kreemer sudah menyebutnya dengan *Meulaboh*.^{vii}

Berdasarkan fakta tersebut, sebagian ahli berpendapat bahwa asal mula kata Meulaboh bukan dari kata *berlaboh*. Dalam bahasa Aceh sendiri terdapat kata *Laboh* yang memiliki beberapa makna, di antaranya membuang, melempar, menjatuhkan, jatuh, turun, dan bergantung rendah. Pengertian itu dikaitkan dengan negeri tersebut yang pernah dilanda tsunami sehingga menjadi jatuh atau turun. Selain itu, nama daerah tersebut sudah disebutkan dalam cerita klasik, manuskrip, dan hikayat yang jauh sebelum kedatangan orang Minang.^{viii}

Pada zaman Belanda, Aceh dibagi dalam dua wilayah keresidenan, yaitu *De Afdeeling Groot Atjeh* (Wilayah Aceh Besar) dan *De Afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh* (daerah taklukan). *Afdeeling* ini dibagi dalam tujuh *onderafdeelingen* dan setiap *onderafdeeling* dibagi dalam tujuh *landschappen*. Salah satu *onderafdeelingen* itu adalah Meulaboh yang

terdiri atas tujuh landschappen. Periode berikutnya Keresidenan Aceh dibagi atas empat *Afdeeling* yang dikepalai oleh seorang asisten residen. Salah satu *Afdeeling* tersebut adalah *Afdeeling Westkust van Atjeh* (Pantai Barat Aceh) yang ibu kotanya adalah Meulaboh.^{ix}

Setelah Indonesia merdeka, wilayah *Westkust van Atjeh* menjadi Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dibentuk berdasarkan surat gubernur Sumatera pada 29 Desember 1945 yang menunjuk Inbu Saadan sebagai Kepala Luhak (Bupati) Aceh Barat. Sementara wilayah administratif Meulaboh mulai dibentuk pada tahun 1946. Administratif kota ini langsung di bawah bupati selaku Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat.

Berdasarkan UU Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1956, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Selatan dengan ibu kotanya Tapaktuan. Pada tahun 1999, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaen Aceh Barat dan Kabupaten Simeulue. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002, Aceh Barat dimekarkan lagi dengan melahirkan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya.

ⁱ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*. (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 211.

ⁱⁱ *Ibid.*

ⁱⁱⁱ *Ibid.*

^{iv} Teuku Dadek dan Hermansyah, *Meulaboh dalam Lintasan Sejarah Aceh*, (Meulaboh: Bappeda Aceh Barat, 2013), hlm 6.

^v *Ibid.*, hlm. 9.

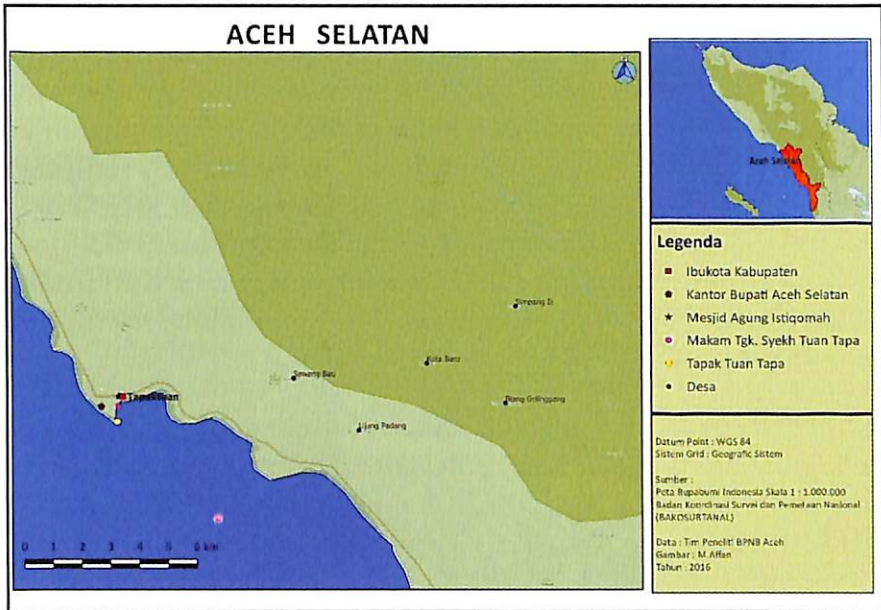
^{vi} K.F.H. van Langen, *Atjeh's Westkust Met Daarbij Behoorende Kaart*. Leiden: E. J. Brill, 1888), hlm. 8.

^{vii} Kreemer, hlm. 123.

^{viii} Teuku Dadek dan Hermansyah, *Meulaboh dalam Lintasan Sejarah Aceh*, (Meulaboh: Bappeda Aceh Barat, 2013), hlm. 4.

^{ix} J. Kreemer, *Atjeh: Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk Atjeh en Onderhoorighede*, (Leiden: E. J. Brill, 1922), hlm. 224.

PETA KABUPATEN ACEH SELATAN



TAPAKTUAN

KABUPATEN ACEH SELATAN

Tapaktuan merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan berbatasan dengan Aceh Barat Daya di sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Sebelah timur berbatasan dengan Aceh Tenggara. Aceh Selatan diapit oleh pegunungan bukit barisan dan Samudera Indonesia (Hindia). Pembentukan Aceh Selatan disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Pada tahun 2002, Aceh Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian menyusul Kota Subulussalam pada 2007.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada mulanya sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Barat, bahkan sejak zaman Belanda. Pada zaman Belanda, Aceh Selatan masuk wilayah *Afdeeling Westkust van Atjeh* dengan ibu kotanya Meulaboh. *Afdeeling Westkust van Atjeh* merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee hingga daerah Singkil dan kepulauan Simeulue. *Westkust van Atjeh* dibagi menjadi 6 (enam) *onderafdeeling*, yaitu Meulaboh, Tjalang, Tapaktuan, Simeulue, Zuid Atjeh (Bakongan), serta Singkil.¹

Aceh Selatan banyak dihuni oleh orang yang datang dari Sumatera Barat yang di Aceh dikenal dengan Aneuk Jamee. Di Tapaktuan terdapat sebuah teluk yang dimanfaatkan sebagai pelabuhan dan tempat bersandarnya

bot dan perahu nelayan. Apabila dilihat dari ketinggian terlihat kota Tapaktuan yang berbentuk teluk. Oleh karena itu, Tapaktuan juga disebut *Taluak* atau *Lhok*. Misalnya, orang yang berdomisili di luar kota Tapaktuan jika mau pergi ke Tapaktuan, mereka mengatakan pergi *u lhok* atau *payi ka taluak*. Selain itu, Tapaktuan juga dijuluki sebagai Kota Naga. Hal itu berkaitan dengan legenda Tuan Tapa dan Putri Naga.

Legenda Tuan Tapa dan Putri Naga berisi cerita tentang sepasang naga yang hidup di Aceh Selatan yang diusir dari negerinya karena tidak mempunyai keturunan. Sepasang naga tersebut kemudian memperoleh anak perempuan yang bernama Putri Naga atau Putri Bungsu. Putri tersebut didapat oleh sang naga di laut lepas. Pada suatu saat, orang tua putri mencari dan mendapatkannya. Namun, sepasang naga yang sudah memeliharanya tidak rela Putri Naga tersebut diambil oleh orang tuanya. Akibatnya, terjadilah keributan antara sepasang naga dengan orang tua Putri Naga.

Sementara tidak jauh dari tempat tersebut terdapat sebuah goa yang bernama Goa Kalam. Di dalamnya terdapat seorang tua yang sedang bertapa. Orang tua ini disebut dengan Tuan Tapa. Tuan Tapa mendengar jeritan dan teriakan orang yang ketakutan. Lalu, Tuan Tapa mengambil tongkatnya dan keluar dari goa. Dengan kesaktiannya, Tuan Tapa melihat dengan jelas di tengah lautan sedang terjadi perkelahian antara sepasang naga dengan penumpang kapal.

Tuan Tapa ingin menengahi perkelahian yang tidak seimbang itu. Namun, sepasang naga yang sudah kalap

berbalik menyerang Tuan Tapa. Perkelahian antara sepasang naga dengan Tuan Tapa berlangsung seru. Bertubi-tubi kedua naga menyemburkan api dari mulutnya, sementara ekor dan cakar mereka tidak ketinggalan menyerang. Berkat kesaktian Tuan Tapa, semua serangan sepasang naga berhasil diredam.

Akibat perkelahian itu, pulau besar yang berada di tengah laut pun hancur dan terpisah-pisah menjadi 99 buah (selanjutnya disebut dengan Pulau Banyak, pulau ini berada di kabupaten Aceh Singkil). Pada suatu ketika, Tongkat Tuan Tapa berhasil mengenai tubuh naga jantan sehingga hancur. Darah naga itu memancar keluar, sebagian besar terpecah ke bagian pesisir dan membeku. Tempat darah naga itu tumpah disebut dengan Desa Batu Sirah atau Batee Mirah. Sementara hati dan jantungnya juga tercampak ke pesisir, daerah ini disebut dengan Desa Batu Itam.

Melihat pasangannya mati, naga betina ketakutan lalu melarikan diri. Naga betina yang panik lari tanpa tujuan dan menabrak sebuah pulau sehingga terpisah menjadi dua pulau (selanjutnya disebut dengan Pulau Dua, berada di wilayah laut Kecamatan Bakongan Timur). Selain peninggalan *batee mirah* dan *batee itam*, pertempuran antara sepasang naga dengan Tuan Tapa, meninggalkan jejak berupa tongkat dan topi yang sudah membatu di dalam laut sekitar 40 m dari pinggir pantai Gunung Lampu dan tapak raksasa di pinggir Gunung Lampu yang dipercayai sebagai bekas tapak Tuan Tapa.

Putri Naga kembali hidup normal layaknya manusia bersama orang tuanya di daratan Cina. Namun, versi lain menyebutkan sang Putri bersama orang tuanya tidak

kembali lagi ke kampung halamannya, tetapi memilih menetap di Aceh. Setelah kejadian itu, Tuan Tapa sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Jasadnya dikuburkan di dekat Gunung Lampu, tepatnya di depan Mesjid Tuo Kelurahan Padang, Kecamatan Tapaktuan. Bekas tapak dalam legenda itulah ibu kota Aceh Selatan diberi nama Tapaktuan (*tapak*=telapak kaki dan *tuan*=Tuan Tapa).ⁱⁱ

K.F.H. van Langen menyebutkan Tapaktuan dengan istilah Tapat Toean.ⁱⁱⁱ Adapula variasi lain yang menyebutkan bahwa Tapaktuan berasal dari kata Tampektuan (*tampek*=tempat dan *tuan* bermakna orang alim). Hal itu berkaitan dengan kedatangan orang Minang ke Aceh dan meminta izin kepada Sultan Aceh untuk menetap di Aceh. Sultan Aceh mengizinkan dan menunjuk Aceh Selatan sebagai tempat tinggal mereka. Ketika orang Minang tersebut tiba di Tapaktuan, mereka mengatakan *di sikolah tampektuan* (di sinilah tempat tuan). Adapula yang mengartikan *tampektuan* dengan tempat Tuan (tuan yang dimaksud adalah Tuan Tapa).^{iv}

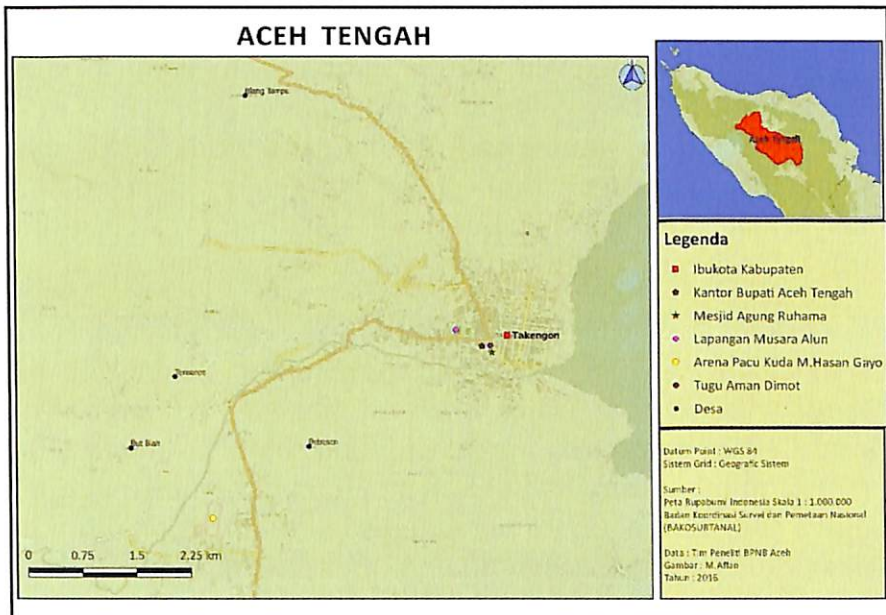
ⁱ Kreemer, *Op. Cit.*, hlm. 230.

ⁱⁱ Legenda itu sudah ditulis dalam bentuk syair oleh M. Soetan Singasoro, *Sja'ir Putri Naga di Tapa'toean*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1932).

ⁱⁱⁱ Langen, *Op. Cit.*, hlm. 13.

^{iv} Idrus Yusuf (66 tahun), Imam Meunasah, *Wawancara*, Banda Aceh, 21 Agustus 2016.

PETA KABUPATEN ACEH TENGAH



TAKENGON

KABUPATEN ACEH TENGAH

Belum ada kesepakatan bersama dari masyarakat etnis Gayo yang merupakan penduduk asli Kota Takengon terkait asal muasal nama Takengon ini. Ibu kota Kabupaten Aceh Tengah di pinggiran Danau Laut Tawar, yang terletak di atas dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1200 m di atas permukaan laut. Banyak versi terkait asal usul penamaan Takengon ini yang tersebar dari dalam masyarakat Gayo sendiri, pun versi dari masyarakat diluar etnis Gayo, seperti halnya dari masyarakat pesisir Aceh.

Pada masyarakat pesisir Aceh telah berkembang cerita-cerita tentang asal usul penamaan Takengon ini. Menurut beberapa orang Aceh di pesisir, Takengon itu berasal dari kata *taki ngon* didalam bahasa Aceh yang artinya 'menipu teman'. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa kata Takengon itu berasal dari kata *tak ngon* didalam bahasa Aceh yang artinya adalah 'membacok teman'. Kami memandang dan menilai pendapat ini tidaklah memiliki argumen yang kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran didalam menentukan bahwa itulah asal muasal dari kata Takengon tersebut. Kami menilai bahwa argumen ini hanya disandarkan pada pandangan stereotype saja, stereotype yang dilekatkan kepada orang Gayo yang merupakan penduduk asli Kota Takengon.

Ada lagi sebagian yang berpendapat bahwa kata Takengon itu berasal dari kata 'tikungan'. Merujuk kepada akses jalan lintas darat menuju Kota Takengon yang penuh

dengan tikungan tajam. Kami memandang bahwa argumen ini merupakan argumen yang lahir belakangan, yang tidak disandarkan pada data historis. Sebagaimana kita mengetahui bahwa nama Takengon ini telah ada sejak zaman Hindia Belanda, bahkan kemungkinan jauh sebelum zaman tersebut, dimana pada masa itu akses jalan lintas darat yang membelah Aceh Tengah menuju Takengon tidaklah sebagaimana saat sekarang ini yang dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dulu orang yang masuk dan keluar Takengon adalah berjalan kaki atau menggunakan hewan tunggangan.

Mayoritas masyarakat Gayo berkeyakinan bahwa nama Takengon ini berasal dari bahasa Gayo, *beta ku engon*, yang artinya 'begitu saya lihat'. Ada satu cerita sejarah yang berkembang di masyarakat Gayo bahwa kawasan ini pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Genali. Kalimat *beta ku engon* yang beliau ucapkan tersebut merupakan ekspresi spontanitas dari beliau tatkala pertama kali melihat Danau Laut Tawar yang menjadi lanskap Kota Takengon dari salah satu bukit yang mengelilingi Danau Laut Tawar. Seiring berjalannya waktu, kalimat *beta ku engon* tersebut berubah fonem menjadi Takengon dan sejak itu pula daerah tersebut diberi nama Takengon.

Pendapat terakhir ini bisa saja benar, pun bisa juga tidak benar. Karena pada kenyataannya masyarakat Gayo yang mendiami Kota Takengon justru lebih sering mengucapkan nama Takengon ini dengan sebutan Takengen didalam kesehariannya. Sebagai contoh, didalam lirik salah satu lagu legendaris di daerah Gayo, karya seorang seniman Gayo bernama AR. Moese, yang disebutkan adalah Takengen

bukan Takengon. Tepatnya pada lirik: “*Kin Takengen aku denem*”.

Mayoritas masyarakat Gayo lebih sering menyebutkan Takengon ini dengan sebutan Takengen didalam keseharian mereka. Akan tetapi orang diluar Gayo telah lebih terbiasa menyebutkan nama kota ini dengan penamaan Takengon. Karena ini merupakan nama yang telah baku di dalam peta pun didalam UU tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tengah yang termaktub dalam UU No. 10 tahun 1948 dan UU No. 7 (darurat) tahun 1956. Pun pada UU tentang pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang telah terjadi sebanyak dua kali pada tahun 1974 yang didasarkan pada UU No. 4 tahun 1974; dan pada tahun 2004 yang didasarkan pada UU No. 41 tahun 2003. Didalam UU tersebut telah disebutkan bahwa ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah adalah Kota Takengon.

Secara *de jure* begitulah adanya, Takengon. Namun secara *de facto* masyarakatnya menyebutkan Takengen. Dan hal ini, mana penyebutan yang benar, juga masih menjadi pro dan kontra pada sebagian masyarakat Gayo yang mendiami Kota Takengon. Bagi yang mendukung dengan nama Takengen ini mengemukakan pendapatnya bukan tanpa landasan. Pendapat mereka justru dibangun diatas argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kaidah didalam bahasa Gayo, akhiran ‘*en*’ itu biasa digunakan untuk menjelaskan suatu tempat dilakukannya sebuah aktifitas. Sebagai contoh: *didisen* yang artinya tempat melakukan kegiatan *berdidis* (metode menangkap ikan pada masyarakat Gayo) ikan depik; *perempusen* yang artinya tempat *berempus* atau berkebun; *pelipenen* yang artinya tempat *berlipen* atau menyeberang sungai, dan sebagainya.

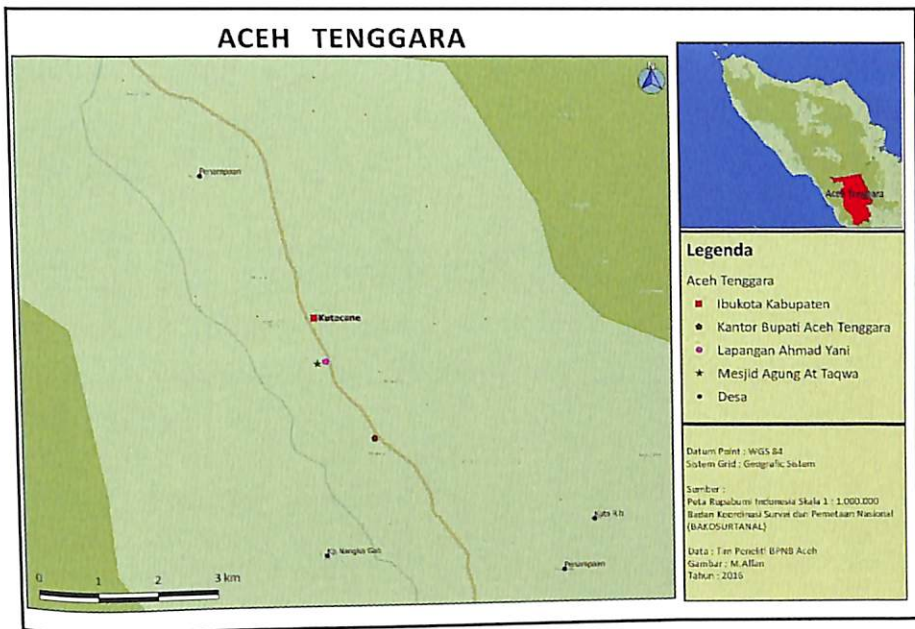
Jadi Takengen kemungkinan besar berasal dari dua suku kata yaitu *takeng/bertakeng* yang kemungkinan berasal dari bahasa Gayo kuno yang sudah hilang karena tidak digunakan lagi oleh masyarakatnya dan tidak diketahui lagi artinya; serta *en* yang berfungsi untuk menjelaskan suatu tempat dilakukannya sebuah aktifitas.¹ Selain itu mereka juga berargumen bahwa Takengen itu adalah penamaan dari dalam masyarakat Gayo sendiri. Gayo yang pertama kali menemukan, menamai, menempati, dan yang memiliki Takengen. Adapun penamaan Takengen itu adalah datang dari orang diluar Gayo yang kemungkinan susah didalam menyebutkan Takengen sehingga lebih memilih penyebutan Takengen yang lebih mudah.

Christian Snouck Hurgronje, seorang antropolog Belanda, yang referensi keilmuannya telah menjadi bahan rujukan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda didalam menaklukkan Aceh hingga termasuk kepada wilayah jajahannya, merupakan orang pertama yang menuliskan Takengen ini dengan Takengen. Pada sekitar tahun 1900 beliau mengumpulkan segala informasi tentang Gayo dan menuliskannya menjadi sebuah buku dengan judul *Het Gajoland en Zijne Bewoners* (Tanah Gayo dan Penduduknya). Didalam buku ini beliau tidak menyebutkan tentang asal usul dari kata Takengen/Takengen, namun beliau menyebutkan/menuliskan Takengen itu dengan Takengen karena lebih gampang disebutkan dengan menggunakan lidah orang Belanda. Dan kemungkinan besar dari sinilah awal penyebutan nama Takengen tersebut, walau secara *de jure* nama yang dipakai adalah Takengen, menurut hemat kami nama Takengen ini lebih sesuai. Hal ini sejalan dengan hasil Seminar Sejarah Nasional I pada Desember 1957 di Yogyakarta yang merupakan awal bagi bangsa ini untuk

kembali melihat sejarah itu sesuai dengan 'kaca mata' orang Indonesia.

ⁱ Yusradi Usman, Wawancara via Handphone, 23 Januari 2017.

PETA KABUPATEN ACEH TENGGARA



KUTACANE

KABUPATEN ACEH TENGGARA

Suasana di ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara ini terasa berbeda dengan kota-kota lain di Aceh. Berkunjung ke Kuta Cane seolah-oleh kita sedang tidak berada di Aceh. Suasana yang kita rasakan justru terasa seperti sedang berada di salah satu kota di Sumatera Utara. Bisa jadi ini lebih dipengaruhi oleh letak wilayahnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan jaraknya yang lebih dekat dengan Kota Medan jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh.

Kuta Cane yang merupakan kampungnya suku Alas ini terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. Kuta Cane merupakan kota yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sebagian besar kawasan taman nasional tersebut adalah masuk kepada wilayah administrasinya Kabupaten Aceh Tenggara. Terkait dengan toponiminya, untuk melacak asal usul nama Kuta Cane ini cenderung lebih mudah jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang akan dan telah kita bahas pada buku ini. Dikarenakan kota ini merupakan salah satu kota yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial dahulu. Jadi masih ada titik terang yang bisa kita temukan didalam menetapkan asal usul dari nama Kuta Cane ini.

Kedatangan pemerintah kolonial Hindia Belanda ke wilayah ini diawali dengan masuknya KNIL yang diperkuat

oleh pasukan elite Marechaussee (Marsose) pimpinan Letkol. Van Daalen pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1903 s/d 1904 M, dimasa-masa menjelang runtuhnya kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Saat memasuki wilayah ini, awalnya pemerintah kolonial menjadikan Kuta Rih sebagai pusat administrasi pemerintahannya. Karena sesuatu hal kemudian pusat administrasi ini dipindah ke sebuah desa kecil yang bernama Pasir Gala.

Pasir Gala yang awalnya merupakan sebuah desa kecil telah berubah wajah menjadi sebuah kawasan ramai penduduk. Sejak dipindahkannya pusat administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda ke Pasir Gala, desa kecil ini mulai didiami oleh penduduk dan pendatang dari luar. Bak semut yang diundang dengan sejumput gula, para pendatang ini mulai mendirikan pemukiman serta mulai menghidupkan perekonomian di sekitar wilayah tersebut. Sejak saat itu desa kecil yang bernama Pasir Gala berubah menjadi sebuah kota kecil dengan nama Kuta Cane. Terkait dengan asal usul penamaan Kuta Cane ini paling tidak ada dua pendapat berbeda yang berkembang di masyarakat. Walau keduanya berbeda akan tetapi kedua pendapat ini sama-sama mengamini bahwa nama Kuta Cane tersebut berasal dari perpaduan dua bahasa.

Pendapat pertama menyebutkan bahwa Kuta Cane berasal dari perpaduan bahasa Alas dengan bahasa Inggris. *Kuta* pada bahasa Alas yang artinya kota dan *cane* dari bahasa Inggris yang artinya rotan atau bisa juga diartikan sebagai tempat pemukulan/cambuk (hukuman). Alasan dari pendapat pertama ini adalah dikarenakan kawasan Kuta Cane dahulunya merupakan kawasan penghasil rotan. Jadi rotan merupakan salah satu hasil hutan yang dulunya biasa

diperdagangkan di daerah ini. Pun pada masa pemerintahan kolonial, Kuta Cane dijadikan sebagai tempat memenjarakan dan menghukum para pemberontak.

Menurut pandangan kami argumen dari pendapat pertama ini sangatlah lemah sekali. Kenapa nama *cane* itu harus diambil dari bahasa Inggris? Apa karena Inggris pernah membeli rotan dari wilayah ini dulunya? Apa kaitan antara aktifitas penghukuman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kata *cane* yang berasal dari bahasa Inggris? Apa hubungan antara wilayah Kuta Cane dengan Inggris? Tentu argumen tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan dapat kita jawab dengan data. Sebagaimana kita ketahui didalam sejarah bahwa Inggris tidak pernah menjajah Aceh, pun tak pernah masuk ke pedalaman Aceh Tenggara.

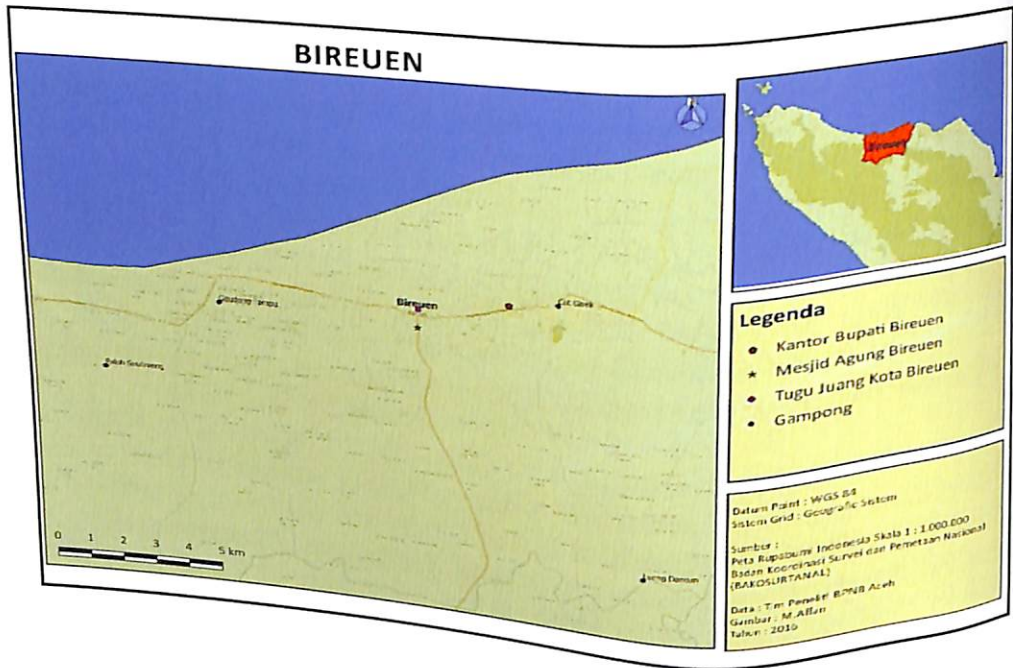
Adapun pendapat kedua, yang menurut kami lebih cenderung kepada kebenaran, nama Kuta Cane itu berasal dari perpaduan antara bahasa Alas dengan bahasa Belanda. Lebih logis karena adanya hubungan antara orang Alas yang dijajah dengan orang Belanda yang menjajah melalui perpanjangan tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pendapat kedua ini menyebutkan bahwa nama Kuta Cane itu berasal dari kata *kuta* dalam bahasa Alas yang artinya kota, dan kata *cane* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tebu. Jadi Kuta Cane itu berasal dari kata kota dan tebu. Pun jika diartikan, Kuta Cane itu adalah kota tebu.

Sebagian masyarakat masih ada yang memperdebatkan kata tebu ini. Argumen dari masyarakat yang memperdebatkan permasalahan ini adalah: Kuta Cane bukan merupakan daerah penghasil tebu, dan berdasarkan

catatan sejarah tidak pernah disebutkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah membuka perkebunan tebu di kawasan Kuta Cane dan sekitarnya. Kami menjawab bahwa argumen penggunaan kata *cane* (tebu) pada nama Kuta Cane itu tidak mesti disandarkan pada fakta bahwa Kuta Cane adalah kawasan produsen tebu, tidak harus. Sebagai contoh Kota Padangsidempuan (salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara) yang dijuluki dengan Kota Salak. Di wilayah Kota Padangsidempuan tidak ada yang namanya kebun salak, justru pusat perkebunan salak itu terdapat di kaki gunung Lubuk Raya, kawasan yang masuk kepada wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun dikarenakan hasil panen salak yang berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dipasarkan di Kota Padangsidempuan, maka jadilah Kota Padangsidempuan sebagai Kota Salak. Bisa saja hal demikian juga terjadi pada Kuta Cane di masa lalu, akan tetapi ini harus didukung dengan data tentunya.

Adapun penggunaan kata *cane* (tebu) ini lebih disandarkan kepada tradisi masyarakat Alas pada masa itu. Tradisi yang sudah mulai jarang kita jumpai saat ini. Tradisi itu bernama *pemamanen*. Semacam tradisi bersilaturrehaim pada masyarakat Alas. Datang berkunjung demi memenuhi undangan dari pihak lain, dan saat melakukan kunjungan itulah pihak yang diundang membawa serta *peulawat* (uang) dan tebu sebagai hadiah pemberian kepada pihak yang mengundang. Maka dahulu disetiap kunjungan tersebut pasti akan selalu membawa tebu sebagai hadiah selain uang. Dikarenakan hal itulah dulunya tanaman tebu itu mudah ditemukan dipekarangan rumah masyarakat Alas di Kuta Cane.

PETA KABUPATEN BIREUEN



BIREUEN

KABUPATEN BIREUEN

Sebelum menjadi kabupaten, Bireuen merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Bireuen sebagai *Onderafdeeling* dari *Afdeeling* Aceh Utara. *Onderafdeeling* Bireuen terdiri atas *landschaap* (kenegerian) Samalanga, *Landschaap* Geulumpang Dua, dan *Landschaap* Peusangan.¹ Demikian pula pada masa pendudukan Jepang, kedudukan Bireuen tetap seperti semula, hanya dalam penyebutannya yang digantikan dalam bahasa Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Bireuen sebagai sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959, Bireuen merupakan Kewedanaan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Dua tahun kemudian keluar pula Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07/SK/11/Des/1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan. Pada tahun 1974, daerah perwakilan Bireuen menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen. Bireuen berkembang

menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999. Sebagian wilayah yang sebelumnya bagian wilayah Aceh Utara menjadi wilayah Kabupaten Bireuen.

Bireuen termasuk daerah yang besar perannya dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada masa perang kemerdekaan, Bireuen merupakan basis kegiatan perjuangan itu di samping pertahanan rakyat semesta. Kegiatan perjuangan itu di antaranya Bireuen sebagai Markas Divisi X/TNI. Bireuen sebagai tempat rapat-rapat penting berkaitan dengan strategi perjuangan. Bireuen pernah pula dijadikan tempat penyiaran Radio Rimba Raya, perkembangan pendidikan, dan agama sehingga Bireuen dikenal sebagai Kota Juang.

Tidak banyak literatur yang dapat diperoleh untuk menjelaskan asal-usul Bireuen. Cerita yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa ketika rombongan yang mengantar gajah putih dari Gayo ke pusat kerajaan Aceh di Banda Aceh singgah di daerah Bireuen sekarang. Mereka singgah di suatu gubuk tempat orang berjualan. Mereka makan dan minum di tempat tersebut. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat tersebut, ketika sudah beranjak beberapa langkah, ada yang mengingatkan bahwa mereka belum membayar makanan dan minuman tersebut, dengan ungkapan *biren* (*biren*=bayar dalam bahasa Gayo).ⁱⁱ

Adapula yang menyebutkan bahwa Bireuen terdiri atas dua kata; *bi* (*beri*) dan *ireuen* (alat penggulung benang) yang terdapat di tempat tenunan kain. Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai juga disebutkan sebuah daerah yang bernama Birun. Daerah tersebut diperintah oleh seorang raja yang bernama Meurah Sum.ⁱⁱⁱ Adapula yang menyebutkan bahwa Bireuen berasal dari nama sebuah kampung yang bernama Biruan. Kata Biruan atau Birun lama kelamaan berubah lafal menjadi Bireuen. Biruan atau Birun termasuk salah satu kampung yang pernah disinggahi oleh Iskandar Muda dalam suatu lawatannya ke bagian utara Aceh.^{iv}

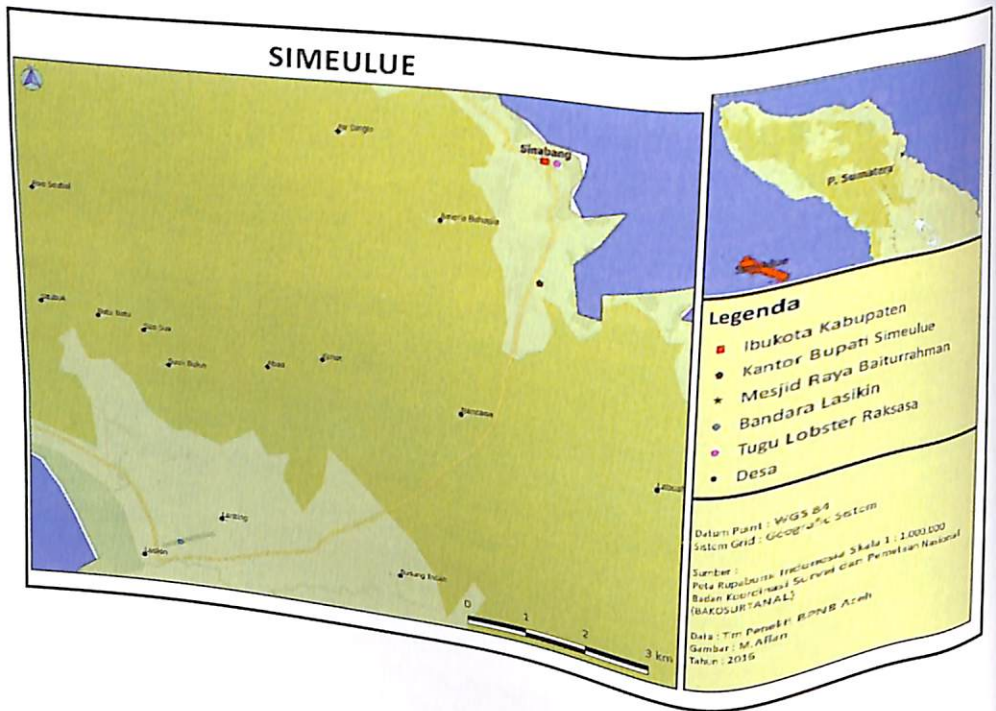
ⁱ Kreemer, *Op. Cit.*, hlm. 215.

ⁱⁱ Abubakar (48 tahun), Arsiparis Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sigli, *Wawancara*, Sigli, 21 April 2016.

ⁱⁱⁱ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 112.

^{iv} Ramli A. Dally, Pemerhati Sejarah dan Budaya Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 27 Juni 2016.

PETA KABUPATEN SIMEULUE



SINABANG

KABUPATEN SIMEULUE

Sinabang adalah ibu kota Kabupaten Simeulue. Sebelum agama Islam masuk ke pulau Simeulue, penduduk yang mendiami pulau ini hidup dalam bentuk persekutuan-persekutuan yang di pimpin oleh kepala suku. Daerah yang didiami oleh penduduk disebut *Bano*, yaitu Bano Teupah, Bano Simulul, Bano Alang, Bano Sigulai, dan Bano Leukon. Setiap kepala suku mempunyai otonomi sendiri dan tidak mempunyai hubungan dalam menjalankan pemerintahan.

Setelah agama Islam masuk ke pulau Simeulue, pemerintah yang bersifat kesukuan menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Teupah, Kerajaan Simulul, Kerajaan Sigulai, Kerajaan Leukon, dan Kerajaan Alang. Setiap kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang disebut *bangulu*. Setiap kerajaan tersebut tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Namun, sistem pemerintahan kerajaan itu dihapus ketika Belanda masuk ke Simeulue.

Pada tahun 1901 Belanda mulai memasuki pulau Simeulue dan membentuk pemerintahan yang disebut *Onderafdeeling* Simeulue berkedudukan di Sinabang dan dipimpin oleh seorang *controleur*. *Onderafdeeling* Simeulue dibagi menjadi 5 *landschap*.¹ Pada zaman pendudukan Jepang, status pemerintahan diganti dengan bahasa Jepang, yaitu *Onderafdeeling* Simeulue dengan Simeulue *Gun*. Status pemerintahan diganti dengan Simeulue *Gun* menjadi Kewedanan Simeulue dari Simeulue

dengan ibu kotanya Sinabang, dipimpin oleh T. Raja Mahmud.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1963 tanggal 25 Oktober 1963 dan Surat Menteri dalam Negeri No. PAM 7/6/18 tanggal 12 Mei 1975 sebutan kewedanan wilayah Simeulue diubah menjadi Perwakilan Kabupaten Aceh Barat di Sinabang yang dipimpin oleh seorang perwakab, Tgk. Mohd. Rasyidin. Berdasar pada UU No. 5 tahun 1975 tentang pokok pemerintahan di daerah dan surat gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No 1912/1.351 tanggal 23 Agustus 1975, sebutan perwakilan Kabupaten Aceh Barat diubah menjadi Pembantu Bupati.

Proses perjuangan melahirkan Kabupaten Simeulue terjadi dalam rentang waktu yang lama. Pada zaman Orde Baru pemekaran wilayah sangat sulit diwujudkan. Namun, masyarakat Simeulue tidak kenal lelah untuk mewujudkan sebuah kabupaten. Hasil perjuangan tersebut lahirnya UU Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Simeulue pada 12 oktober 1999. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Faisal Tanjung, di Departemen Dalam Negeri Jakarta.

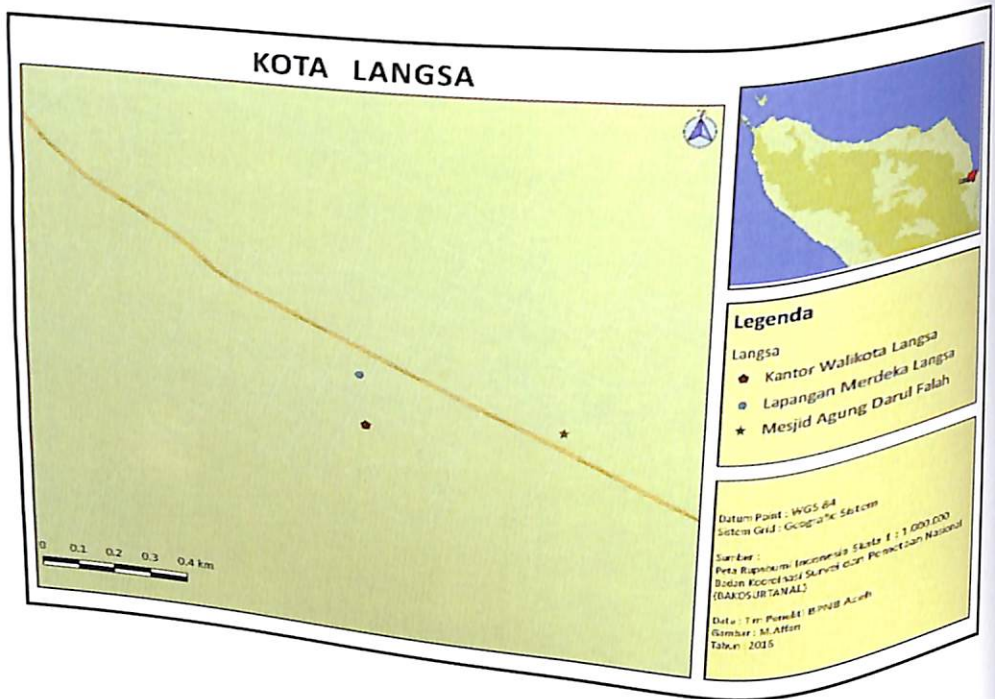
Sinabang sebelumnya sebagai ibu kota kecamatan Simeulue Timur. Sinabang berasal dari legenda Si Navang. Navang adalah seorang pembuat garam di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang). Navang membuat garam dengan cara membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadi garam. Ujung Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan hingga ke Lugu. Ketika penduduk membutuhkan garam, mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun

konsonan v pada Navang berubah menjadi Nabang dan akhirnya menjadi Sinabang.ⁱⁱ

ⁱ Kremeer, *Op. Cit.*, hlm. 236.

ⁱⁱ Suhardi (42 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Banda Aceh, 10 Juli 2016.

PETA KOTA LANGSA



LANGSA

KOTA LANGSA

Pada tahun 1990-an Kota Langsa merupakan sebuah Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1991 yang mengatur tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa, dan saat itu Kota Langsa merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Timur. Seiring berjalannya waktu, setelah hampir 20 tahun sejak ditetapkannya Langsa sebagai Kota Administratif, statusnya naik menjadi Kota Langsa pada tahun 2001. Dasar dari perubahan status ini adalah UU No. 3 tahun 2001. Sejak saat itulah Langsa resmi berstatus Kota Madya yang membawahi lima wilayah kecamatan yakni, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Timur.

Saat pertama mendengar kata Langsa, pasti ada saja yang berprasangka bahwa nama kota ini berasal dari kata *langsat*. Sejenis buah duku dengan nama latin *Lansium domesticum*, atau yang dikenal juga dengan nama buah *langsep* ataupun kokosan. Apa benar demikian? Apakah benar dulunya di kota ini banyak terdapat pohon atau kebun *langsat*? Atau mungkin karena buah *langsat* yang berasal dari kawasan ini memiliki cita rasa yang lebih khas jika dibandingkan dengan jawabannya adalah tidak. Tidak ada hubungan antara buah *langsat* dengan kata Langsa. Asal muasal nama Kota Langsa sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan buah yang rasanya lebih didominasi dengan rasa asam tersebut.

Dari data yang coba kami telusuri terkait dengan sejarah asal usul penamaan Kota Langsa, ada dua versi cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat mengenai sejarah asal usul penamaan Langsa ini. Mulai dari cerita perseteruan antara kelompok burung elang dengan kelompok Angsa, sampai kepada cerita tentang burung elang berukuran besar yang dahulu pernah terlihat terbang berputar-putar di atas wilayah ini pada masa lalu. Kesamaan dari kedua cerita ini adalah sama-sama melibatkan peran burung elang di dalam narasinya.

Pada zaman dahulu kala berdirilah dua kerajaan unggas yang sama-sama memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, serta sama-sama memiliki bala tentara yang sama-sama kuat. Kerajaan Elang yang menguasai wilayah Kuala Idi di Aceh Timur dan kerajaan Angsa yang berkuasa atas wilayah Kuala Simpang di Aceh Tamiang. Suatu masa kerajaan Elang sedang ditimpa masa-masa sulit, masa dimana persediaan ikan yang ada di kuala (muara sungai) yang mereka kuasai mulai menipis. Jika dibandingkan antara populasi burung elang dengan jumlah ketersediaan ikan yang mulai menipis, tentu kondisi seperti ini menimbulkan kekhawatiran bagi Raja Elang. Untuk itulah sang raja mengutus panglima kerajaan Elang guna melaksanakan tugas khusus yakni mencari kuala baru yang memiliki persediaan ikan yang cukup untuk mengatasi masalah krisis yang sedang dihadapi kerajaan Elang.

Titah sang Raja dijalankan oleh sang Panglima. Dengan disertai seratus pasukan burung elang ekspedisi inipun mulai dilaksanakan oleh sang Panglima. Singkat cerita rombongan inipun sampailah pada sebuah kuala yang dipenuhi dengan ikan, hati sang Panglima pun amatlah

senang. Harapanpun tercurahkan kepada kuala ini, berharap dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi kerajaan Elang. Akan tetapi rasa senang yang dirasakan sang Panglima seketika saja terganggu dengan keberadaan sekawan Angsa yang sedang asik mencari ikan di kuala tersebut.

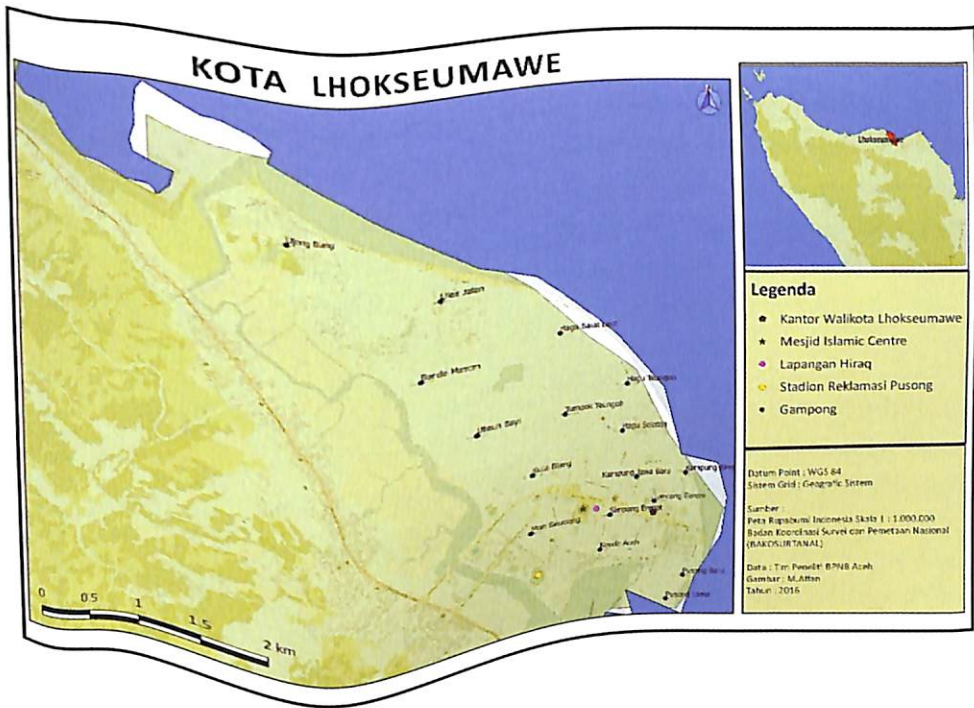
Merasa yang paling berhak atas kuasa di kuala tersebut, sang Panglima Elang kemudian menghardik dan mengusir kawan Angsa ini. Karena kawan Angsa ini kalah jumlah, merekapun menarik diri dan bergegas menuju kerajaan Angsa dan melaporkan perihal ini kepada Raja Angsa. Dikarenakan kuala ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan sang Raja Angsa, rajapun mengerahkan ratusan pasukan Angsa untuk kembali merebut daulat atas wilayah kuala tersebut. Perangpun tak terelakkan, dan dalam peperangan ini panglima Elang mengalami kekalahan dikarenakan jumlahnya yang kalah dengan pasukan Angsa.

Akhirnya panglima Elang mundur selangkah dan mengutus salah satu dari pasukan Elang untuk kembali menghadap sang raja guna meminta bantuan bala tentara. Singkat cerita bala bantuanpun datang, peperangan merebut kuasa atas kuala tersebut kembali terjadi. Oleh karena sama-sama mengalami kerugian yang sama besarnya, akhirnya konsiliasi ditempuh oleh kedua belah pihak. Dan kesepakatan telah bulat, selama lima hari dalam satu minggu kerajaan Angsa berkuasa atas kuala ini, dan sisa dua harinya kerajaan Elanglah yang berkuasa atas kuala ini. Tempat kerajaan ini mereka namakan dengan Langsa, yang diambil konsiliasi ini mereka dan Angsa, dan kuala yang mereka dari kata Elang dan Angsa, dan kuala yang mereka perebutkan tersebut diberi nama Kuala Langsa.

Walau di Kota Langsa kita tidak akan pernah menemukan tugu Elang dan Ansa sebagaimana tugu ikan Sura dan Buaya yang merupakan asal usul nama Kota Surabaya, akan tetapi sebagian masyarakat meyakini inilah asal usul nama Kota Langsa. Adapun pendapat kedua, dan kami lebih berpegang kepada pendapat ini, menyebutkan bahwa nama Kota Langsa berasal dan terdiri dari dua suku kata yakni elang dan besar, yang kemudian menjadi singkatan didalam penyebutannya Langsar, kemudian seiring berjalannya waktu berubah fonem menjadi Langsa. Dan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda kawasan Kota Langsa ini disebut dengan Langsar oleh pemerintah kolonial.

Konon katanya yang pertama kali membuka perkampungan di kawasan Kota Langsa adalah seorang pangeran yang berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat. Beliau masuk ke kawasan ini melalui Selat Malaka hingga masuk ke daerah Titi Kembar. Pada saat pangeran tersebut merambah kawasan belukar dan mengubahnya menjadi lahan perkampungan, saat itu datang seekor burung elang besar yang terbang berputar-putar di atas lahan tersebut. Dan sejak saat itulah kawasan itu diberi nama Langsar yang berasal dari singkatan kata elang dan besar yang kemudian berubah fonem menjadi Langsa, dan posisinya tepat di Desa Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama.

PETA LHOKSEUMAWE



LHOKSEUMAWE

KOTA LHOKSEUMAWE

Pada saat kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 silam, disaat semua pandangan tertuju kepada Aceh, disaat hati tersentuh oleh rasa kemanusiaan, dan pada saat seluruh kepedulian tercurahkan untuk meringankan luka di Aceh. Selain Kota Banda Aceh yang terkena dampak paling parah, kota yang pada masa Orde Baru disebut sebagai kota Petro Dolar (dikarenakan kemegahan beberapa proyek vital dibidang migas yang dibangun di kota ini) juga merasakan dampak dari bencana itu. Kota transit yang diapit oleh dua kota besar, Kota Banda Aceh dan Kota Medan. Kota Lhokseumawe yang berada di wilayah pantai timur Aceh juga tidak bisa luput dari kerusakan yang timbul dari bencana gempa bumi dan tsunami tersebut.

Pada saat ditimpa bencana gempa bumi dan tsunami, Kota Lhokseumawe baru saja berusia tiga tahun. Lhokseumawe resmi menjadi kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 2 tahun 2001. Sebelum statusnya naik menjadi kotamadya, dulunya Lhokseumawe merupakan kota administratif dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Utara. Setelah Kota Lhokseumawe resmi berpisah dari Kabupaten Aceh Utara, maka yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Aceh Utara adalah Lhoksukon.

Ada beberapa nama daerah di Aceh yang diawali dengan kata *lhok*. Paling tidak ada tiga yang paling dikenal yaitu Lhokseumawe, Lhoksukon, dan Lhoknga. Kata *lhok*

yang berasal dari bahasa Aceh jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah dalam, atau bisa juga diartikan sebagai teluk atau palung laut. Adapun nama Lhokseumawe ini terdiri dari dua suku kata yakni *lhok* yang diartikan sebagai teluk atau palung laut, dan *seumawe* yang artinya air yang berputar-putar atau pusat mata air. Jadi dari segi bahasa Lhokseumawe bermakna teluk atau palung laut yang di dalamnya terdapat air yang berputar-putar.

Kawasan Kota Lhokseumawe merupakan daratan yang menjorok ke laut, yang pada sisi timur dan baratnya terdapat sebuah teluk yang membentang sepanjang lepas pantai di Kecamatan Banda Sakti dan sekitarnya. Arus air laut yang terdapat di teluk ini pada kenyataannya memang berputar-putar. Inilah kiranya sebab kenapa kota ini diberi nama Lhokseumawe.

Ada sebagian dari masyarakat etnis Aceh yang merupakan penduduk asli Kota Lhokseumawe mengaitkan asal usul nama Lhokseumawe ini dengan nama seorang *teungku* (ulama/ustadz/ahli agama), yaitu Teungku Lhokseumawe. Seorang alim ulama sekaligus pejuang Islam yang sangat gigih melawan bangsa penjajah pada masa Kerajaan Samudera Pasai. Konon katanya beliaulah yang pertama kali membuka perkampungan di kawasan Lhokseumawe, kawasan yang dulunya merupakan hutan belukar dan rawa-rawa.

Tidak ada data tertulis serta bukti otentik terkait tentang siapa sebenarnya Teungku Lhokseumawe ini, lahir dan berasal dari mana, bagaimana latar keulamaannya, serta latar dan bentuk perlawanannya terhadap penjajah hingga kepada cerita tentang kematiannya. Akan tetapi sebagian

masyarakat meyakini bahwasanya beliauah orang pertama yang merintis berdirinya Kota Lhokseumawe dan dari nama beliauah nama Lhokseumawe ini diambil. Pun masyarakat tersebut sangat berkeyakinan bahwasanya beliau syahid disalah satu peperangan melawan penjajah pada masa Kerajaan Samudera Pasai.

Sangat disayangkan sekali bahwa keyakinan sebagian masyarakat atas kebesaran nama Teungku Lhokseumawe ini hanya disandarkan pada satu-satunya bukti yaitu sebuah makam yang terdapat di Kampung Banda Masen, kampung tertua, yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti. Makam yang diyakini oleh masyarakat sebagai makam Teungku Lhokseumawe. Saksi bisu yang tidak akan pernah bisa bercerita kepada kita siapa sebenarnya Teungku Lhokseumawe ini. Keyakinan sebagian masyarakat terkait keberadaan dan kebesaran nama Teungku Lhokseumawe ini sangatlah paradoks dengan kisah sejarah tentang perjalanan panjang Kota Lhokseumawe di masa lalu. Sampai-sampai mengalahkan kebesaran nama dan sejarah emas Kerajaan Samudera Pasai.

Sebagaimana kita ketahui berdasarkan catatan-catatan sejarah di masa lampau dan berdasarkan buku-buku sejarah yang bercerita tentang Kerajaan Samudera Pasai, bahwa pusat dari kerajaan ini berada di sekitar kawasan Kota Lhokseumawe saat ini, dengan wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Aceh. Andai kata keyakinan sebagian masyarakat tersebut benar, menurut hemat kami sudah barang tentu nama besar Teungku Lhokseumawe pastilah tercantum didalam Hikayat Raja Pasai yang merupakan salah satu referensi utama dalam kajian sejarah tentang Kerajaan Samudera Pasai. Tidak terhenti sampai

disitu, terkait kematian dari Teungku Lhokseumawe yang menurut keyakinan sebagian masyarakat bahwa beliau syahid saat berbeperang melawan penjajah pada masa Kerajaan Samudera Pasai. Tentu ini akan menimbulkan rentetan-rentetan pertanyaan rumit yang akan membuat kita susah menemukan jawabannya.

Apakah benar Teungku Lhokseumawe merupakan orang pertama yang membuka perkampungan di kawasan sekitar Lhokseumawe yang saat itu masih hutan belantara berrawa? Jika benar demikian bagaimanakah keadaan Kerajaan Samudera Pasai pada saat itu? Sudah berdiri ataukah belum? Jika belum, mungkinkah beliau syahid berjuang melawan penjajah di masa Kerajaan Samudera Pasai? Atau katakanlah pada masa itu Kerajaan Samudera Pasai telah berdiri, berdasarkan fakta yang demikian berarti beliau bukanlah orang pertama yang membuka perkampungan di sekitar kawasan Lhokseumawe pada masa itu, karena beliau telah ikut berjuang melawan penjajah di masa kekuasaan salah satu sultan di Kerajaan Samudera Pasai.

Jadi berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa asal usul nama Kota Lhokseumawe ini tidaklah bisa disandarkan pada keyakinan sebagian masyarakat yang mengkait-kaitkannya dengan nama Teungku Lhokseumawe, karena lemah dari sisi argumentasinya. Kami lebih cenderung kepada pendapat pertama sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, bahwa penamaan Lhokseumawe ini lebih didasarkan pada fakta letak geografis dari Kota Lhokseumawe itu sendiri, yang di sisi timur dan sisi baratnya terdapat sebuah *lhok* (teluk) yang *seumawe* atau yang air berputar-putar.

PETA KOTA SABANG



SABANG

KOTA SABANG

Jika merujuk pada lagu lirik lagu "dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau; Sambung-menyambung menjadi satu itulah Indonesia; Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu; Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia." Ini kita sepakat bahwa simpul keindonesiaan itu dimulai dari ujung paling barat Indonesia yang berada tepat di atas pulau Sumatera, Kota Sabang yang terletak di Pulau Weh yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Dan diakhiri sampai ke ujung paling timur Indonesia, yakni Merauke di Papua.

Banyak cerita yang telah beredar di masyarakat kita terkait dengan asal muasal nama Sabang ini. Mulai dari kisah-kisah catatan perjalanan para pelaut terkemuka dunia pada masa lalu yang menceritakan tentang suatu wilayah 'emas' yang saat ini sebagian kita menyimpulkan bahwa wilayah tersebut adalah Pulau Weh, hingga kepada mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Terlalu jauh jika kita mengaitkan tentang cerita asal muasal nama Sabang ini dengan nama Ptolomacus yang merupakan seorang ahli bumi dari Yunani yang pada sekitar tahun 301 SM telah melakukan pelayaran hingga sampai ke sebuah pulau yang beliau beri nama Pulau Emas, atau cerita



tentang seorang pelaut bernama Sinbad, pun catatan seorang penjelajah asal Tiongkok yang bernama Cheng Ho, walau kisah tentang kemasyhuran Pulau Emas yang kita persepsikan dengan Pulau Weh sebagaimana yang mereka kisahkan didalam catatan perjalanan mereka, tetap saja di dalam catatan mereka tersebut tidak menyebutkan tentang kata Sabang.

Asal usul nama Sabang ini juga tentu tidak bisa disandarkan sepenuhnya kepada mitologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Cerita mitos tentang perseteruan Raja Daru dan Raja Alam yang berujung pada pertarungan antara seekor naga bernama Sabang milik Raja Alam dengan dua raksasa Seulawah (Agam dan Inong) yang membantu Raja Daru, yang pada akhirnya menyebabkan berguncangnya bumi dan menimbulkan *le Beuna* (tsunami) sehingga terpisahnya Pulau Weh dengan Ulee Lheue (saat ini menjadi pelabuhan penyeberangan dari Banda Aceh - Sabang).

Menurut pendapat kami kisah ini lebih kepada sebuah kearifan lokal yang coba diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana *smong* yang hidup di tengah-tengah masyarakat Pulau Simeulue, yang mengandung peringatan dini terkait kebencanaan. Akan tetapi dalam bentuk mitologi.

Terkait kebencanaan ini, dengan wilayah Aceh yang merupakan daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami, mungkin kita bisa menemukan jalan dalam rangka mencari asal usul nama Sabang ini. Kemungkinan bisa saja proses terjadinya Pulau Weh merupakan dampak yang terjadi akibat gempa bumi dahsyat yang disusul oleh

datangnya tsunami besar di masa lalu, dan asal usul nama Sabang itupun kemungkinan besar tidak jauh-jauh dari persoalan ini.

Ada sedikit informasi menarik yang menurut kami juga penting untuk disampaikan di sini, karena paling tidak ini juga akan menguatkan kerangka dalil terkait asal usul kata Sabang ini. Pasca kejadian gempa bumi dan tsunami dahsyat yang menimpa Aceh pada tahun 2004 silam, beberapa peneliti geologi dari Singapore Earth Observatory telah melakukan sebuah penelitian di salah satu gua yang terdapat di daerah Lhoknga. Dari hasil penelitian tersebut mereka merilis bahwa di Aceh paling tidak sudah pernah terjadi tsunami sebanyak 7 sampai dengan 10 kali, yang dipicu oleh gempa bumi dengan kekuatan minimal 8 skala Richter per setiap 500 tahun sekali. Maka berdasarkan hasil penelitian ini mereka memprediksi kejadian serupa akan terjadi lagi 500 tahun kedepan terhitung sejak kejadian tsunami di tahun 2004 yang lalu.

Bisa saja terpisahnya Pulau Weh dengan Pulau Sumatera di masa lalu adalah disebabkan oleh salah satu dari gempa bumi dan tsunami per 500 tahun sekali tersebut. Sebagaimana 'weh' di dalam bahasa Aceh yang berarti pindah. Pulau Weh pindah/bergeser meninggalkan Ulee Lheue yang masih menurut masyarakat Aceh berasal dari kata 'l'heueh' yang artinya lepas.

Jadi jikalau ada yang berkesimpulan bahwa Pulau Weh diberi nama dengan 'weh' lebih kepada bentuk pulau yang menyerupai huruf 'W' tentu ini tidak bisa dijadikan sandaran karena bisa saja pendapat ini muncul belakangan,



tepatnya setelah ditemukannya teknologi satelit, seminimalnya pesawat.

Hipotesa ini juga dikuatkan dengan kenyataan posisi Pulau Weh dan Aceh (atau Pulau Sumatera secara keseluruhan) yang berada pada Patahan Semangko yang membentang sepanjang 1900 KM mulai dari Banda Aceh hingga ke Teluk Semangko di selatan Lampung, yang membentang paralel dengan Zona Subduksi Asia yang merupakan konvergensi antara Lempeng Tektonik dengan Lempeng Tektonik Australia.

Kembali kepada pembahasan kita diawal. Ada yang berpendapat bahwa Sabang berasal dari kata *saban* di dalam bahasa Aceh yang artinya sama rata tanpa ada diskriminasi. Hal ini didasarkan pada karakter orang Sabang yang lebih mudah menerima para pendatang dari luar Pulau Weh. Dan seiring berjalannya waktu kata *saban* itu berubah penyebutan menjadi Sabang.

Sebagian lagi berpendapat bahwa Sabang itu berasal dari bahasa Arab, *shabag*, yang artinya gunung berapi yang meletus. *Shabag* ini kemudian berubah penyebutan menjadi Sabang. Sebagaimana tersebut di dalam catatan bahwa dahulu di Pulau Weh dan Sabang banyak terdapat gunung berapi aktif.

Berdasarkan rujukan data-data yang telah kita sebutkan di atas, kami lebih condong kepada kesimpulan bahwa asal usul kata Sabang itu berasal dari bahasa Arab, *shabag*, yang artinya gunung berapi yang meletus. Pun pada nama Pulau Weh dan Ulee Lhueu yang merujuk pada kata yang terdapat di dalam bahasa lokal setempat (Aceh) yakni *weh* (pindah) dan *lheueh* (lepas).

Jadi, sejarah penamaan Sabang, Pulau Weh, dan Ulee Lheue tidak bisa terpisah satu sama lainnya. Penamaan ketiganya lahir dari sebuah fenomena alam, peristiwa gempa bumi dan tsunami pada masa lampau. Yang kemungkinan besar terjadi pada salah satu dari 7 s/d 10 kali kejadian gempa bumi dan tsunami dahsyat di masa lalu yang akan terus berulang persetiap 500 tahun sekali sebagaimana rilis penelitian yang dilakukan oleh Singapore Earth Observatory.

